

**POLA KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK (UU NO.14 TAHUN 2008 Tentang KIP)  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

**DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN**

**SEKRETARIAT**

No	Jenis Informasi	
<b>BAGIAN KEPEGAWAIAN</b>		
1	Penilaian Pegawai (DP3, Uji Kelayakan dan Kepatutan)	
2	Usulan Data Calon Pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan baperjakat	
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	
4	Administrasi Proses Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai	
5	Dokumen proses perceraian CPNS/PNS yang mengajukan izin cerai	
6	Proses evaluasi penempatan CPNS	
7	Evaluasi Jabatan	
8	<i>Database</i> Pegawai DJKI (Rujukan PP No. 61 th 2010)	
9	Penyusunan Formasi Pegawai	
10	Perpindahan dan Mutasi Pegawai	
11	Penetapan Angka Kredit (usulan)	
<b>BAGIAN P2L</b>		
1	Disposisi dari Sekretaris Direktorat Jenderal KI atau Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential	
2	Laporan hasil Pemeriksaan BPK	
3	Laporan Hasil pemeriksaan APIP	
4	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
5	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	
6	Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	
7	Review Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	

**DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**

No	Jenis Informasi	
1	Disposisi dari pejabat yang bersifat <i>confidential</i> (pribadi dan rahasia).	
2	Data kelengkapan permohonan Merek dan Indikasi Geografis kecuali atas permintaan oleh pemohon sendiri/ahli waris/perintah pengadilan.	
3	Proses pemeriksaan substantif permohonan pendaftaran merek dan indikasi geografis.	
4	Dokumen Deskripsi Indikasi Geografis yang masih dalam	

	proses penyelesaian pendaftaran dan belum mendapatkan putusan akhir.	
5	Permohonan pertanyaan persamaan pada pokoknya/keseluruhannya atas suatu merek.	
6	Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi ahli oleh penyidik.	
7	Dokumen yang berkaitan dengan perkara di pengadilan baik format jawaban, gugatan, replik, duplik, dan kesimpulan akhir sebelum adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap baik pada proses litigasi maupun pada gugatan putusan Komisi Banding Merek.	
8	Dokumen yang berkaitan dengan permohonan banding merek yang masih dalam proses sampai dengan Putusan Komisi Banding Merek yang mempunyai kekuatan hukum tetap.	
9	Surat dan dokumen lainnya yang dianggap penting dan rahasia yang berkaitan dengan penegakan hukum di bidang Merek dan Indikasi Geografis.	
10	Data kelengkapan permohonan Perpanjangan, Pengalihan Hak, Perubahan nama dan/atau alamat, serta Lisensi Merek dan Indikasi Geografis terdaftar kecuali atas permintaan oleh pemohon sendiri/ahli waris/perintah pengadilan.	
11	Dokumen perjanjian Lisensi dan Pengalihan Hak Merek terdaftar.	

#### DIREKTORAT PATEN, DTLST DAN RD

No	Jenis Informasi	
	<b>PERMOHONAN DAN PUBLIKASI</b>	
1	Disposisi dari Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential	
2	Informasi terkait dengan invensi yang diperkirakan akan dapat mengganggu atau bertentangan dengan kepentingan pertahanan keamanan Negara.	
3	Setiap Permohonan Paten, Paten Sederhana, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebelum dilakukan Publikasi oleh Direktorat Paten, DTLST dan RD bersifat rahasia	
4	Setiap Surat Kelengkapan Permohonan Paten , Paten Sederhana dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebelum dipublikasi oleh Direktorat Paten, DTLST dan RD bersifat rahasia	
5	Semua surat menyurat terkait kedinasan yang belum ditanda-tangani oleh Direktur Paten, DTLST dan RD	

6	Laporan Hasil Pemeriksaan internal, baik pada tingkat Pemeriksa Paten maupun pada tingkat Komisi Banding Paten	
7	Laporan Hasil Pemeriksaan eksternal, baik pada tingkat Pemeriksa Paten maupun pada tingkat Komisi Banding Paten, yang belum ditanda-tangani Pemeriksa Paten atau Pemeriksa pada tingkat Komisi Banding Paten	
<b>PELAYANAN HUKUM</b>		
1	Surat dan dokumen lainnya yang dipandang penting dan rahasia yang terkait dengan penegakan hukum di bidang paten	
2	Menginformasikan pada publik tentang salinan berkas-berkas dokumen terkait dengan perkara yang sedang ditangani, baik format jawaban, gugatan, replik, duplik, serta kesimpulan akhir sebelum adanya berkekuatan hukum tetap tentang perkara yang sedang berlangsung baik pada proses litigasi maupun pada gugatan putusan Komisi Banding Paten di Pengadilan.	
3	MoU atau surat-surat yang terkait dengan proses pertimbangan hukum yang sedang berlangsung.	
4	Keterangan Ahli Perkara (BAP) yang masih dalam proses.	
5	Dokumen yang berkaitan dengan perkara banding Paten yang masih diproses sampai Putusan Komisi Banding mempunyai kekuatan hukum tetap	

#### DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI

No	Jenis Informasi	
1	Disposisi dari Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential	
2	Konfigurasi Perangkat Lunak / Keras Teknologi Informasi	
3	Nama ( <i>username</i> ) dan Kata Kunci ( <i>Password</i> ) Pengguna Perangkat Lunak / Keras Teknologi Informasi	
4	Pangkalan Data ( <i>Database</i> ) Internal Paten dan Desain Industri yang belum diumumkan dalam berita resmi	

#### DIREKTORAT KERJA SAMA DAN PEMBERDAYAAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Jenis Informasi	
1	Disposisi dari Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential	
2	Draft perjanjian dengan pihak dalam dan luar negeri yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum pada pihak-pihak yang terikat atas perjanjian tersebut	
3	Surat-surat/ dokumen-dokumen dengan klasifikasi rahasia	

4	Risalah rapat internal pimpinan menyangkut kebijakan yg bersifat rahasia berikut dokumen pendukungnya	
5	Kertas posisi DJKI dan posisi Indonesia untuk negosiasi perjanjian/isu internasional lainnya sebelum dibahas pada pertemuan/sidang/negosiasi dan ada hasil yang final	
6	Draft/ masukan/ konsep atas suatu Konvensi Internasional yang akan diratifikasi	

**DIREKTORAT HAK CIPTA DAN DESAIN INDUSTRI**

No	Jenis Informasi	
	<b>Hak Cipta</b>	
1	Disposisi pejabat yang lebih tinggi atau setingkat yang bersifat Confidential	
2	Proses dan putusan verifikasi permohonan Hak Cipta yang belum ditandatangani Direktur	
3	Data kelengkapan seluruh permohonan Hak Cipta	
	<b>Desain Industri</b>	
1	Disposisi pejabat yang lebih tinggi atau setingkat yang bersifat Confidential	
2	Proses pemeriksaan dan putusan permohonan Desain Industri yang dilakukan oleh pemeriksa Desain Industri yang belum ditandatangani Direktur	
3	Mengenai permohonan pertanyaan kebaruan atas Desain Industri	
4	Data kelengkapan seluruh permohonan Desain Industri	
5	Seluruh proses permohonan Desain Industri dan putusan (Sertifikat) yang belum ditandatangani oleh Direktur	
	<b>Pelayanan Hukum Hak Cipta dan Desain Industri</b>	
1	Pencatatan Pembatalan karena Putusan Pengadilan	
2	Konsep Gugatan, Jawaban Replik, Duplik, Akta Bukti, Kesimpulan dalam Perkara Pembatalan Desain Industri dan Pencatatan Ciptaan	
3	Memori Kasasi, Kontra memori Kasasi, Memori Peninjauan	

	Kembali, Kontra Memori Peninjauan Kembali	
4	Ketrangan Ahli Perkara (BAP) yang masih dalam proses	
5	Surat pendapat Hukum kecuali untuk kepentingan yang bersangkutan	
6	Proses Pemeriksaan Keberatan terhadap Keputusan Penolakan Pendaftaran Permohonan Desain Industri	
7	Rekomendasi Persetujuan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang dikeluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)	
8	Dokumen Penerbitan Izin Operasional Lembaga Manajemen Kolektif	
9	Dokumen Rekomendasi Penetapan Tarif Royalti yang diusulkan LMKN kepada Menteri	
10	Dokumen Hasil Pengawasan Lembaga Manajemen Kolektif	
11	Berita Acara hasil Verifikasi ijin operasional Lembaga Manajemen Kolektif	

#### UNIT LAYANAN PENGADAAN

No	Jenis Informasi / Unit Kerja	
1	Disposisi dari Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential	
2	Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Barang dan Jasa	
3	Dokumen Penawaran	
4	Dokumen Persyaratan Kualifikasi	
5	Hasil Evaluasi Administrasi, Teknis dan Kualifikasi	
6	Rincian evaluasi penawaran, dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi	

#### DIREKTORAT PENYIDIKAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

NO	JENIS INFORMASI	
1	Disposisi dari Pejabat yang lebih tinggi atau yang setingkat yang bersifat Confidential	
2	Nama Pihak Pelapor, Terlapor dan/ atau saksi	

3	Seluruh dokumen Terkait Dengan Surat Perintah Pada Setiap Tahapan Proses Penyidikan	
4	TKP Sebelum Penindakan	
5	Seluruh Berita Acara Terkait Proses Penyidikan	
6	Semua Dokumen Yang Terkait Dengan Proses Mediasi	
7	Semua Dokumen Yang Terkait Dengan Sengketa	
8	Seluruh surat panggilan Pelapor, Tersangka dan/ atau Saksi	
9	Surat – surat terkait kordinasi	
10	Hal-hal Yang Terkait dengan Inventaris Barang Bukti yang telah di sita	
11	Nama-nama para pihak yang bermediasi	
12	Bidang Kekayaan Intelektual yang di mediasikan	
13	Hasil dari mediasi apabila mediasi telah selesai dilaksanakan	

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 3 Mei 2017  
Plt. Direktur Jenderal Kekayaan  
Intelektual

Aidir Amin Daud  
NIP. 195811201988101001